

**Pantang Mengemis Demi Sejahterakan Keluarga
Implementasi Program Desaku Menanti di Pasuruan
Abstinence Begging for The Sake of Family Prosperity
The Implementation of Program Desaku Menanti**

Tyas Eko Raharjo F.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta. Tlp. (0274) 377265
HP. 08175455989. E-mail tyasekoraharjo@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the independence of bums and beggars through fulfilling family's needs the needs both physical, psychological, and social. A qualitative descriptive and qualitative approach to uncover Gepeng's independence in meeting family needs. The research was conducted in Pasuruan District with the location setting of the village settlement awaiting Prodo Village Winongan District. The data source was determined purposively, the head of the beneficiary family of my village awaiting who has gained skills guidance. Data collection was conducted through interviews with guidelines, observation, document review and bibliography, with qualitative data analysis. The results show that beneficiary families have been able to fulfill family needs. Efforts to fulfill the needs by doing basic work and being worshiped with the ownership of side jobs by family members. The needs of the family include physical, psychological, and social needs. It is recommended that the Ministry of Social Affairs synergize with the local government which is the location of "Desaku Menanti" monitoring and guidance on a regular basis. In relation to this research, East Java Provincial Social Service and Pasuruan District Social Service become central in conducting guidance to beneficiary families of ex Gepeng

Keywords: *Needs fulfillment; Homeless and Beggar; My village is waiting.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesejahteraan gelandangan dan pengemis penghuni pemukiman desaku menanti melalui pemenuhan kebutuhan keluarga, baik fisik, psikis, dan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengungkap kesejahteraan Gepeng. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dengan lokasi pemukiman desaku menanti Desa Prodo Kecamatan Winongan. Sumber data ditetapkan secara *purposive*, yaitu kepala keluarga penerima manfaat desaku menanti yang telah mendapatkan bimbingan keterampilan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pedoman, observasi, telaah dokumen dan kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis, secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keluarga penerima manfaat telah sejahtera yang dibuktikan dengan mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dengan melakukan pekerjaan pokok dan ditambah pekerjaan sampingan. Keterpenuhan kebutuhan keluarga tersebut meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan kebutuhan sosial. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi lokasi program desaku menanti untuk melakukan monitoring dan bimbingan secara berkala. Berkaitan dengan penelitian ini maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan menjadi sentral bimbingan keluarga penerima manfaat eks Gepeng.

Kata Kunci: *Pemenuhan kebutuhan; Gelandangan dan Pengemis; Desaku menanti.*

A. Pendahuluan

Kemajuan pembangunan yang semakin pesat di perkotaan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan penduduk daerah sekitarnya. Dampak yang terjadi berupa positif dan negatif,

yakni pembangunan di kota mengundang penduduk desa mencari kerja di kota dan menjadi negatif apabila pendatang pencari kerja tersebut tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat mendukung pemenuhan persyaratan-

an kerja. Pembangunan yang pesat diperkotaan menjadi daya tarik penduduk desa untuk mengadu nasib pindah ke kota walaupun tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan. Timbul arus urbanisasi penduduk desa kota memunculkan gelandangan dan pengemis, karena dengan ketiadaan keterampilan membuat para urban tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Ketidadaan kepemilikan keterampilan dirasa membuat kehidupan yang memprihatinkan dengan tidak memiliki pekerjaan layak.

Berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk pemecahan masalah sosial gelandangan dan pengemis (gepeng) terutama untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Demikian juga berbagai penelitian telah dilakukan demi menemukan model yang tepat dalam merehabilitasi gepeng supaya menjadi mandiri dan memiliki pekerjaan layak dan mulia. Kenyataan belum semua program dapat berjalan dengan baik dan masih mengalami hambatan di lapangan.

Gepeng menjadi permasalahan serius untuk diantisipasi khususnya di kota besar karena mereka menjadi pemandangan yang mengganggu lingkungan. Munculnya gepeng berawal dari urbanisasi penduduk tidak mampu dan tidak berdaya dalam menjalani kehidupan di kota. Pada umumnya mereka melakukan urbanisasi untuk mengubah nasib dengan mencari pekerjaan yang layak demi kesejahteraan keluarga. Tidak mampuan dalam pengetahuan dan keterampilan maka tidak dapat memperoleh pekerjaan sesuai harapan, dan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Oleh karena itu Gepeng merupakan pilihan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kehidupan keluarga.

Kementerian Sosial menjadikan program rehabilitasi gepeng sebagai program unggulan dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Beberapa program yang diluncurkan Kementerian Sosial dalam penanganan gepeng, diantaranya adalah sistem rehabilitasi sosial berbasis panti dan non panti atau Lingkungan Pondok Sosial. Program penanganan

gepeng tersebut dirasa masih belum menciptakan kemandirian gepeng secara optimal. Hal ini terbukti masih banyak gepeng yang kembali melakukan kegiatan sebagai pengemis di kota.

Penanganan masalah gepeng memerlukan tindakan secara serius dan terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah setempat. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis, serta Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Gelandangan Dan Pengemis. Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial mengembangkan model rehabilitasi sosial gepeng secara terpadu berbasis desa. Keterpaduan program tersebut diwujudkan dengan mengikutsertakan beberapa kelembagaan terkait untuk merehabilitasi sosial gepeng.

Berdasar permasalahan tersebut pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kesejahteraan keluarga gepeng setelah mendapat rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti, dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesejahteraan keluarga gepeng dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, baik fisik, psikis, dan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial terkait dengan penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pengkajian dari Implementasi Program Desaku Menanti dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Penelitian kualitatif ini untuk mengungkap tentang makna subjektif secara mendalam terkait dengan gejala sosial yang diamati dari sisi pelaku (subjek), termasuk mengungkap proses dan dinamika dari gejala sosial bersangkutan (Noeng Muhajir, 2002), Sementara menurut Suharsimi Arikunto (2001: 309), penelitian deskriptif adalah penelitian

yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis permasalahan tertentu, tetapi mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, suatu gejala atau keadaan pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini untuk mengetahui kemandirian gelandangan dan pengemis dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai informasi, fakta, serta fenomena berkaitan dengan kemandirian pengemis dan gelandangan yang menjadi penghuni desaku menanti.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut menjadi tempat pemukiman para gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti. Dengan demikian peneliti mudah untuk mendapatkan informasi secara detail dan dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yakni penghuni pemukiman Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Data primer diperoleh dari informan, dengan teknik pengumpulan data wawancara secara baku (*standardized interview*), yaitu wawancara yang dilakukan menggunakan panduan untuk menggali informasi berkaitan dengan kesejahteraan gepeng dalam pemenuhan kebutuhan keluarga pascarehabilitasi sosial dari program desaku menanti. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teknik lain, yaitu observasi.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kehidupan gepeng selama tinggal di pemukiman program desaku menanti. Untuk itu peneliti mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian yang menjadi data dalam menganalisis. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini, yakni pengamatan berdasar pada pengalaman secara langsung atas objek yang diteliti. Kegunaan teknik ini, peneliti dapat melihat dan mencatat

mengenai perilaku atau peristiwa yang terjadi, sehingga memungkinkan peneliti memahami berbagai situasi yang ada. Pengamatan merupakan cara terbaik untuk mengecek kebenaran suatu data, sehingga dalam kasus tertentu, apabila komunikasi yang lain tidak memungkinkan maka pengamatan menjadi alat yang dapat dimanfaatkan peneliti. Tentu saja dalam penelitian ini dibutuhkan juga data sekunder untuk melengkapi data lainnya. Data tersebut diperoleh dari buku, laporan, jurnal *website*, dan sumber lain (telaah dokumen).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data pada dasarnya adalah proses mengorganisasikan dan mereduksi data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan suatu kesimpulan. Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data.

C. Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis

Gepeng adalah masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus karena memiliki persoalan yang kompleks bersifat pada psikis mental juga memiliki permasalahan patologis yakni tingkah lakunya bertentangan dengan norma kebaikan di masyarakat (Kartini Kartono, 2011). Timbulnya gepeng berawal dari kemiskinan penduduk sebagai dampak adanya ketimpangan sosial terkait dengan perkembangan ekonomi yang biasa terjadi di wilayah perkotaan (Irsan Suani, 2015). Keberadaannya dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan umum yang cenderung lebih melanggar normayang ada di lingkungan masyarakat.

Berdasar permasalahan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bermitra dengan Kementerian Sosial RI dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Sahabat Harapan Mandiri Sejahtera (LKS SAHAJA) melaksanakan kegiatan penanganan masalah gepeng dengan program desaku menanti yang mulai dirancang pada tahun

2012. Program ini bertujuan mengembalikan gepeng yang hidup menggelandang di kota untuk kembali ke desa, dengan maksud memulai hidup baru dan berusaha di desa. Sejak Tahun 2011 Pemerintah provinsi Jawa Timur memprioritaskan program percepatan penanganan lima PMKS yaitu anak jalanan, WTS, gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik.

Lokasi pemukiman gepeng dengan program desaku menanti terletak di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan pusat pemerintahan berada di Kota Bangil. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menangani gepeng, salah satunya merehabilitasi sosial gepeng secara terpadu berbasis desa dengan program desaku menanti. Program desaku menanti merupakan program yang diprakarsai Kementerian Sosial RI dilaksanakan Lembaga Kesejahteraan Sosial salah satunya di Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan pihak LKS bagi gepeng calon penghuni rumah desaku menanti melalui pembekalan berupa bimbingan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Bimbingan dan keterampilan dilakukan selama tiga bulan, demikian juga para gepeng dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan rumah sehingga dengan keterlibatan diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki. Para gepeng penghuni desaku menanti juga mendapatkan bantuan stimulan untuk mengembangkan usaha hasil bimbingan keterampilan yang telah diikuti.

Pada tahun 2014, Desaku Menanti Desa Prodo dihuni sebanyak 35 kepala keluarga dan sebanyak 136 jiwa. Kemudian tahun 2015 bertambah menjadi 50 kepala keluarga, namun pada tahun 2016 mengalami pengurangan penghuni lima keluarga menjadi 45 kepala keluarga. Jumlah keluarga tersebut berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Madiun, dan Pasuruan.

D. Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

Mendengar istilah gepeng sering kali dihubungkan dengan keramaian kota besar. Anggapan yang sering ditemukan, bahwa keramaian kota besar menimbulkan tumbuh dan berkembangnya gepeng. Permasalahan yang terjadi sering dikarenakan adanya kesenjangan antara desa dengan kota. Keramaian kota dengan berbagai fasilitas menginformasikan penduduk desa untuk pindah ke kota demi mendapatkan pekerjaan. Disayangkan kepindahan penduduk desa tersebut tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan sebagai syarat mencari kerja. Dengan demikian mereka menjadi pengangguran di kota, sementara pemenuhan kebutuhan hidup harus segera terpenuhi, maka menjadi gepeng adalah pilihannya.

Gelandangan adalah orang yang hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan layak pada umumnya. Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dengan mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di depan umum dengan berbagai cara dan mengharapkan belas kasihan orang lain (PP. No.31 Tahun 1980). Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan menjadi tempat rehabilitasi gepeng dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 50 kepala keluarga yang berhasil dikumpulkan dan direhabilitasi serta diberdayakan dengan pemberian bimbingan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Jumlah 50 tersebut terdapat lima kepala keluarga yang tidak dapat mengikuti proses pemukiman dengan baik dan mereka menyatakan pergi dari rumah tinggalnya, sehingga sampai saat ini penghuni yang menetap tinggal di pemukiman desaku menanti sebanyak 45 kepala keluarga. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat program “Desaku Menanti” di Kabupaten Pasuruan mendapatkan jatah hidup (Jadup) sebanyak Rp 600 ribu per jiwa selama

tiga bulan. Kegiatan program yang berlokasi di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan awalnya pada tahun 2014 memberikan pelayanan bagi 35 KK dan 136 jiwa yang berasal dari Surabaya, Malang, Madiun dan Pasuruan, Lumajang, Nganjuk. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Jatim, Yusmanu (Jumat, 4-5-2017) mengatakan, dalam program ini setiap KK mendapatkan sebidang tanah seluas 100 m² dan berdiri bangunan seluas 4 x 6 m dengan fasilitas air, listrik, jalan perumahan, musholla, ruang pertemuan dengan total nilai Rp 30 juta per KK. Dana tersebut masuk ke rekening masing masing KK dan mereka mengerjakan sendiri rumahnya dengan dibantu beberapa tenaga tukang dari lingkungan desa sekitar. Disamping bantuan tersebut mereka juga mendapatkan bantuan UEP (Usaha Ekonomis Produktif) sesuai dengan minat dan keterampilan masing masing warga binaan sosial dan sesuai dengan kemampuan masing-masing penerima manfaat sesuai minat usahanya. “Setiap KK juga mendapatkan bantuan peralatan dapur dari Kementerian Sosial RI dan peralatan rumah tangga dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya pada tahun 2015 bertambah penghuni Desaku Menanti sebanyak 15 KK, sehingga keseluruhan penghuni warga Desaku Menanti menjadi 50 KK. Namun dengan berjalannya waktu dari jumlah tersebut mulai berkurang 5 KK pada tahun 2016 sampai pada saat peneliti melakukan pengumpulan data dan pengamatan ternyata jumlah warga binaan sosial yang masih aktif tinggal di Desaku Menanti sebanyak 45 KK. PMKS khususnya gelandangan dan pengemis, merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan khusus, karena permasalahannya lebih bersifat psikis, dan mental, permasalahan gelandangan pengemis memiliki permasalahan patologis. Artinya keberadaannya dianggap oleh masyarakat mengganggu ketertiban, keamanan umum serta cenderung melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

Permasalahan gelandangan dan pengemis bermula dari permasalahan kemiskinan dan sebagai dampak dari ketimpangan sosial dari pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya kecenderungan peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan. Implikasi permasalahan gelandangan dan pengemis cukup kompleks, karena tidak hanya dalam aspek sosial ekonomi saja tetapi juga memberikan dampak pada ketertiban dan keamanan di daerah terutama di perkotaan.

Kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari kepemilikan pekerjaan, jumlah penghasilan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Beberapa aspek dalam kebutuhan keluarga yakni kebutuhan fisik, psikis, sosial, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Oleh karena itu apabila seseorang atau keluarga dapat melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut maka keluarga akan dianggap sejahtera, sesuai pendapat Edi Suharto, (1997) bahwa pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan keadilan.

Berdasar pengamatan dari segi umur ternyata para gepeng yang berhasil diberdayakan dan direhabilitasi termasuk dalam kategori usia produktif. Lebih jelasnya dapat disimak pada tabel 1.

Tabel 1. Umur Kepala Keluarga Penerima Manfaat

No	Umur	F	Persen
1	19 - 35	15	33,33
2	36 - 55	20	44,45
3	>56	10	22,22
Total		45	100

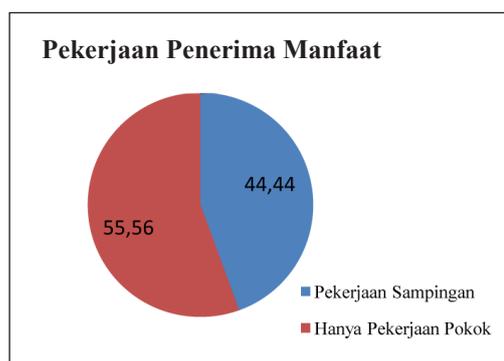
Sumber : data primer, 2017

Data pada tabel 1 menunjukkan, bahwa gepeng sebagai penerima manfaat program desaku menanti sebagian besar masih berusia produktif yakni diantara usia 19 sampai dengan 55 tahun sebanyak 35 kepala keluarga atau 77,78 persen. Umur termuda pada gepeng penerima manfaat berumur antara 19 sampai

dengan 35 tahun sebanyak 15 orang (33,33 persen) dan usia tertua 56 tahun ke atas sebanyak 10 orang (22,22 persen). Meskipun usia penerima manfaat masih produktif, tetapi pada umumnya penghasilan mereka rendah. Hal ini dikarenakan belum secara optimal dalam melakukan pekerjaan dan usaha. Oleh karena itu dengan usia yang masih produktif mereka berupaya menggerakkan anggota keluarganya untuk dapat melakukan pekerjaan sampingan. Usia produktif menjadi modal mereka dalam semangat berusaha demi kesejahteraan keluarga.

Pendidikan gepeng sebagai warga binaan sosial di desaku menanti sebagian besar mereka tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yakni sebanyak 66,67 persen. Dalam penerapannya, pendidikan yang mereka miliki tidak dapat menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Kota Surabaya, karena pendidikan tersebut tidak didukung dengan keterampilan yang memadai. Keterampilan menjadi penting dalam kaitan dengan perolehan pekerjaan seseorang. Pada dasarnya dengan pendidikan rendah mereka mampu meninggalkan pekerjaan lama sebagai pengemis dan melakukan pekerjaan sebagai wirausaha setelah mendapatkan bimbingan dan keterampilan. Mereka telah mengalami perubahan dalam berpikir, hal ini menunjukkan adanya kemajuan, bahwa mereka tinggal di lingkungan Desaku Menanti Margo Utomo (di Desa Prodo) merupakan proses terjadinya perubahan dalam mengentaskan masalah gepeng. Proses tersebut diperoleh melalui bimbingan dan keterampilan yang dilakukan pemerintah terkait. Bimbingan yang diperoleh memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan selama menjadi penghuni Desaku Menanti. Sebagaimana pendapat Rizky Dwitanto Putro, (2015) meskipun mereka berpendidikan rendah tetapi semangat untuk berubah meninggalkan pekerjaan lama sebagai gepeng menjadi modal utama dalam mensejahterakan keluarga

Mereka tidak mau lagi untuk mengemis dan memilih bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki pada saat mengikuti bimbingan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki membangkitkan semangat mereka untuk bekerja sekuat tenaga demi kesejahteraan keluarga di kampung desaku menanti. Berikut disajikan data kepemilikan pekerjaan para penerima manfaat setelah mengikuti bimbingan keterampilan.



Data pada diagram di atas menunjukkan, bahwa para penerima manfaat seluruhnya telah memiliki pekerjaan pokok dan sebanyak 44,44 persen memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan yang ditekuni merupakan hasil dari bimbingan sosial dan keterampilan yang pernah diikuti di kampung desaku menanti. Disamping menekuni pekerjaan pokok, mereka juga memiliki pekerjaan sampingan yang dikelola oleh istri atau anggota keluarga lain yang tinggal di rumah. Pekerjaan sampingan merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah dengan melakukan kegiatan rutinitas keluarga, seperti menjual nasi pecel, membuat peyek kacang, membuka warung gorengan, *lotheek*, dan *handy-crafts* atau kerajinan tangan.

Kepemilikan pekerjaan dapat dimaknai bahwa penerima manfaat telah mengalami perubahan cara berpikir yang semula hanya mengemis dan menggelandang kini menjadi wirausaha. Seluruh penghuni Margo Utomo mengaku *kerasan* tinggal di lingkungan Margo Utomo terlebih karena sebagian besar telah mendapatkan registrasi identitas yang jelas. Berdasar hasil wawancara mereka mengaku

telah merasakan hidup tenang, nyaman tinggal di lingkungan Desaku Menanti Margo Utomo mendapat rumah dan pekerjaan yang layak. Penghasilan yang diperoleh dapat disimak pada sajian tabel 3.

Tabel 3. Penghasilan Keluarga Penerima Manfaat

No	Penghasilan (Rp)	f	Persen
1	501.000 – 1.000.000	6	13,33
2	1.001.000 – 1.500.000	25	55,55
3	1.501.000 – 2.000.000	8	17,77
4	2.001.000 – 3.000.000	6	13,33
5	>3.001.000	-	-
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Tabel 3 menunjukkan, bahwa seluruh keluarga penerima manfaat telah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan wirausaha. Penghasilan tersebut murni dari jerih payah mereka dalam melakukan pekerjaan sebagai wirausaha dan penjual jasa sesuai keterampilan yang dimiliki. Sajian data pada tabel 3 memberikan makna, bahwa penghasilan yang diperoleh dapat dikatakan layak dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan beban tanggungan keluarga. Sebanyak 45 keluarga penerima manfaat dengan penghasilan sebagian besar antara Rp. 1.001.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- sebanyak 39 keluarga (86,67 persen) yang artinya keluarga penerima manfaat dapat menggunakan keterampilan yang didapat pada saat bimbingan sosial dan keterampilan.

Keluarga nyaman tenteram tinggal bersama keluarga. Tidak semua Gepeng malas bekerja dan pasrah pada keadaan. Mereka menjadi gepeng karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dan kemiskinan yang dialami. Mereka memiliki etos kerja yang tinggi untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga dengan semangat tidak mengenal menyerah terlihat pada pekerjaan yang ditekuni sebagai tukang bangunan dan sebagian anggota keluarga masih melakukan pekerjaan sampingan dengan usaha warung nasi pecel. Pada pagi sampai sore hari sebagian mereka lakukan pekerjaan sebagai tukang

bangunan selanjutnya pada malam harinya membantu keluarga menyiapkan barang usaha warung nasi pecel dan makanan kecil lainnya. Aktivitas tersebut menjadi rutinitas demi memperoleh penghasilan keluarga. Dari penghasilan tersebut mereka mengaku mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Keterpenuhan kebutuhan keluarga akan berpengaruh pada beban tanggungan keluarga. Banyaknya beban tanggungan keluarga dapat disimak pada sajian data pada tabel 4.

Tabel 4. Tanggungan Keluarga Penerima Manfaat

No	Tanggungan	f	Persen
1	2 - 3 orang	16	25,55
2	4 - 5 orang	22	48,88
3	6 - 7 orang	7	15,55
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data pada tabel 4 menunjukkan, bahwa beban penerima manfaat sebagian besar dua sampai dengan lima orang yakni sebanyak 38 keluarga (84,44 persen). Sekitar tujuh keluarga (15,55 persen) memiliki tanggungan keluarga sebanyak enam sampai tujuh orang. Data pada tabel 4 dapat dimaknai, bahwa jumlah tanggungan penerima manfaat tidak menjadi masalah bagi mereka karena telah memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan sebagaimana pada sajian data pada tabel 3. Penghasilannya telah mencukupi dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan anak. Demikian juga pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sudah terdapat beberapa keluarga yang menambah ruang untuk kamar tidur. Renovasi bangunan tempat tinggal dengan menambah kamar ternyata telah disesuaikan dengan banyaknya beban keluarga penerima manfaat, sehingga meskipun tanggungan keluarga banyak dapat terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu keluarga yang memiliki beban tanggungan antara empat sampai dengan tujuh orang dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya

Kebutuhan keluarga yang semestinya harus terpenuhi dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Pemenuhan kebutuhan fisik mencakup pada terpenuhinya tempat tinggal, makan, pakaian, dan kesehatan (Edi Suharto, 1997) Terpenuhinya kebutuhan fisik dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, makan, pakaian, dan kebutuhan kesehatan pada keluarga penerima manfaat. Pemenuhan kebutuhan berdasar pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sebenarnya semua keluarga telah terpenuhi kebutuhannya. Namun keterpenuhan tempat tinggal perlu dilihat kembali terkait dengan penyediaan ruangan pada tempat tinggal dengan jumlah orang yang menjadi penghuni rumah. Terkait pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dapat disimak pada tabel 5.

Tabel 5. Kebutuhan Tempat Tinggal Keluarga Penerima Manfaat

No	Kebutuhan Ruang	f	Persen
1	Kamar tidur sesuai kebutuhan tanggungan	39	86,67
2	Kamar tidur kurang sesuai kebutuhan	4	8,89
3	Kamar tidur belum terpenuhi	2	4,44
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data pada tabel 5 menunjukkan, bahwa pemenuhan kebutuhan fisik pada aspek pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan ketersediaan ruangan ternyata sebagian besar telah tercapai. Sebanyak 39 keluarga atau 86,67 persen telah terpenuhi kebutuhan penyediaan ruang tidur bagi anggota keluarga. Masih terdapat empat keluarga atau 8,89 persen yang mengaku ketersediaan ruang tidur kurang sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga dan dua keluarga 4,44 persen mengaku belum terpenuhi. Hasil observasi menunjukkan, bahwa keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan ruang tidur bagi keluarga ternyata mereka sudah mulai melakukan renovasi rumahnya dengan menambah kamar tidur. Mereka telah mampu secara mandiri da-

lam mengusahakan penambahan ruang tidur, karena mereka bisa menjadi tukang sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tukang.

Kebutuhan makan merupakan suatu kebutuhan individu yang mutlak untuk dipenuhi. Frekuensi makan bagi setiap orang berbeda karena faktor seperti usia, kebutuhan asupan gizi, dan kebiasaan. Menurut ilmu kesehatan khususnya ilmu gizi, makanan yang memenuhi syarat kesehatan adalah dengan komponen menu empat sehat lima sempurna (Baliwati, dkk, 2004). Pada tabel 6 disajikan frekuensi kebutuhan makan per hari bagi keluarga penerima manfaat responden pengkajian.

Tabel 6. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Berdasarkan Kebutuhan Makan

No	Kebutuhan Makan	f	Persen
1	Tiga kali sehari	41	91,11
2	Dua kali sehari	4	8,89
3	Satu kali sehari	-	-
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data tabel 6 menunjukkan, bahwa dari seluruh penerima manfaat selaku responden terdapat 41 kepala keluarga (91,11 persen) yang mengaku telah memenuhi kebutuhan makan tiga kali sehari. Keterpenuhan kebutuhan makan tiga kali sehari dikarenakan kepala keluarga telah memiliki pekerjaan pokok dan penghasilan. Demikian juga yang mengaku pemenuhan kebutuhan makan dua kali sehari sebanyak empat kepala keluarga atau 8,89 persen mengaku, bahwa mereka makan nasi dua kali siang dan malam, tetapi pada pagi harinya makan dengan makanan kecil seperti pisang goreng atau singkong rebus. Dengan demikian seluruh penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan makan dengan memperoleh asupan gizi yang sehat.

Kondisi pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dimaknai, bahwa pada umumnya seluruh penerima manfaat telah mampu memenuhi kebutuhan makan keluarga dengan memperhatikan asupan gizi sehat, meskipun terdapat

beberapa keluarga makan dua kali sehari tetapi mereka sarapan dengan makanan selain nasi. Oleh karena itu mereka sebenarnya telah makan tiga kali dalam sehari. Berdasar penjelasan keluarga penerima manfaat terkait pemenuhan kebutuhan makan, pemenuhan kebutuhan makan bagi keluarga penerima manfaat dapat dikatakan 100 persen terpenuhi.

Mengenai pemenuhan kebutuhan pakaian para keluarga penerima manfaat selaku responden berhasil digali dan datanya dapat disajikan dalam tabel berikut. Kebutuhan pakaian secara kualitas dan kuantitas.

Tabel 7. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Berdasar Kebutuhan Pakaian

No	Kebutuhan Pakaian	f	Persen
1	Kualitas baik	2	4,44
2	Kualitas cukup	10	22,22
3	Kualitas sederhana	33	73,33
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Kebutuhan pakaian para penerima manfaat seiring dengan kebutuhan makan mereka, artinya semakin tinggi status sosial ekonomi penerima manfaat, semakin tinggi pula tuntutan kebutuhan pakaian yang mereka gunakan. Sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi penerima manfaat, maka semakin sederhana pula kebutuhan pakaian. Data pada tabel 7 memperlihatkan, bahwa sebagian besar penerima manfaat ternyata hanya membutuhkan pakaian dengan kualitas sederhana, bahwa mereka membeli pakaian dari penjual keliling dan pakaian pantas pakai yang mereka beli, yakni 33 kepala keluarga (73,33 persen). Mereka sebagian terdiri dari keluarga berstatus sosial ekonomi menengah ke atas dan keluarga sederhana. Sebagian penerima manfaat yang lain yakni dua keluarga (4,44 persen) mampu memenuhi kebutuhan pakaian dengan kualitas baik. Pemenuhan kebutuhan pakaian dengan kualitas cukup dilakukan oleh 10 keluarga (22,22 persen).

Pada tabel 7 menunjukkan, bahwa kehidupan di lingkungan permukiman desaku menanti

ternyata telah tumbuh kelompok dan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga yang memiliki pekerjaan pokok dengan penghasilan lebih tinggi dan kepemilikan rumah telah direnovasi memiliki status sosial lebih tinggi. Hal ini karena penerima manfaat telah memiliki pekerjaan dan keterampilan yang bervariasi. Status sosial akan tumbuh sesuai dengan pekerjaan dan kepemilikan yang ada pada lingkungan tinggal (Haryanto, Sindung. 2011).

Di samping terungkap pemenuhan kebutuhan pakaian para penerima manfaat secara kualitas, terungkap pula pemenuhan kebutuhan pakaian secara kuantitas, dalam arti berapa kali dalam satu tahun keluarga penerima manfaat membutuhkan pakaian. Sebagian besar para penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pakaian untuk keluarga dilakukan satu kali dalam setahun yakni sebanyak 40 keluarga (88,89 persen). Mereka membeli pakaian pada hari raya Idul Fitri, dan sebanyak lima keluarga mengaku membeli pakaian sebanyak dua kali dalam setahun. Mereka yang mengaku membeli pakaian dua kali dalam setahun tersebut sering kali dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pada hari raya, keluarga membeli pakaian baru sebagai tradisi. Berdasar pengakuan keluarga penerima manfaat, mereka telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara fisik terutama dalam pemenuhan kebutuhan pakaian.

Mengenai data pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat dapat disimak pada sajian pada tabel 8

Tabel 8. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Berdasar Kebutuhan Kesehatan

No	Kebutuhan Kesehatan	f	Persen
1	Dokter Praktek	-	86,67
2	Puskesmas	39	8,89
3	Tukang urut/pijat	4	4,44
4	Obat tradisional	2	
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Data pada tabel 8 menunjukkan, bahwa sebagian besar penerima manfaat telah melakukan perawatan kesehatan keluarga dengan cara memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah yakni puskesmas sebanyak 39 keluarga (86,67 persen). Artinya bahwa penerima manfaat telah sadar dan mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Mereka telah sadar dalam menjaga kesehatan keluarga melalui pengobatan medis, walaupun masih terdapat beberapa keluarga yang menggunakan pengobatan tradisional dan urut/pijat yakni enam keluarga (13,33 persen).

Pemenuhan kebutuhan psikis bagi keluarga penerima manfaat meliputi aspek kebutuhan rekreasi, keamanan/rasa tenteram, dan kepuasan batin. Pemenuhan kebutuhan rekreasi dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan pekerjaan yang ditekuninya. Bekerja disamping memperoleh penghasilan juga menjadi sarana untuk melampiasakan pemenuhan kebutuhan rekreasi. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai pedagang keliling dan buruh bangunan, dianggap sebagai hiburan atau rekreasi. Oleh karena itu dalam hal pemenuhan kebutuhan psikis terkait aspek rekreasi 41 keluarga (91,11 persen) dapat terpenuhi dengan baik. Keluarga lain sebanyak empat keluarga (8,89 persen) masih mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi, dan mereka mengaku selalu menabung untuk kebutuhan rekreasi keluarga.

Pemenuhan kebutuhan psikis pada aspek rasa aman/nyaman sangat sulit untuk dilihat karena rasa aman dan nyaman sangat spesifik untuk diketahui. Berdasar wawancara diketahui, bahwa dalam pemenuhan kebutuhan psikis khususnya rasa aman tinggal di lingkungan desaku menanti dapat dirasakan dari kondisi rukun dalam bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam kebersamaan. Berdasar informasi dan pengumpulan data dari keluarga penerima manfaat, ternyata kehidupan di lingkungan desaku menanti memberi ketentraman bagi keluarga. Sebanyak 45 keluarga (100,00 persen) mengaku *kerasan* tinggal di lingkungan

desaku menanti. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan rasa aman oleh keluarga penerima manfaat dapat dinyatakan terpenuhi dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan pada aspek kepuasan batin bagi keluarga penerima manfaat dapat disimak dalam sajian data terkait pengakuan keluarga penerima manfaat pada tabel 9.

Tabel 9. Pemenuhan kebutuhan Psikis Berdasar Kebutuhan Rasa Puas

No	Kebutuhan Rasa Puas	f	Persen
1	Puas	39	86,67
2	Cukup Puas	4	8,89
3	Kurang Puas	2	4,44
Total		45	100

Sumber : Hasil Pendataan, 2017

Sajian data pada tabel 9 memperlihatkan sebanyak 39 keluarga (86,67 persen) keluarga penerima manfaat mengaku puas dengan pemberian layanan bimbingan dan keterampilan. Keluarga penerima manfaat juga mengaku cukup puas dan bahkan ada juga yang memberi penjelasan dirinya kurang puas dengan kondisi di lingkungan desaku menanti, yakni empat atau 8,89 persen.

Kondisi tersebut artinya bahwa keluarga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan akan rasapuas ketidakpuasan yang dirasakan hanya karena anaknya tidak naik kelas.

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan keluarga dalam kaitannya sebagai makhluk sosial yang selalu memiliki hasrat pemenuhan untuk berkelompok, berelasi dan berinteraksi, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Edi Suharto, 2010). Masyarakat selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain terlebih dalam kehidupan di lingkungan desaku menanti. Hidup bermasyarakat sangat diperlukan terutama dalam kehidupan di lingkungan tempat tinggal. Kehadiran dalam pertemuan warga merupakan wujud dalam pemenuhan kebutuhan sosial. Berdasar pengakuan keluarga penerima manfaat terkait dengan keterlibatan dan kehadiran dalam pertemuan warga sebanyak 45 ke-

- Haryanto, Sindung. (2011). *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Irsan Suani. (2015). *Masalah Gepeng di Kota Makasar*. Makasar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar.
- Kartini Kartono, (2010). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Keputusan Presiden No. 40, (1983). *Koordinasi Penanggulangan masalah Gelandangan dan pengemis*.
- Noeng Muhajir, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 31, (1980). *Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis*
- Rizky Dwitanto Putro, (2015). *Pembinaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Kartan Pemalang*. Semarang.
- Rancangan Peraturan Menteri Sosial. (2013) tentang *Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.